**Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar dengan Metode Literatur**

**Hasna Muthi Luthfiyah1, Dinie Anggraeni Dewi2, Yayang Furi Furnamasari3**

1,2,3Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia

Email: luthfiyahhasnamth@upi.edu1, dinieanggraenidewi@upi.edu2, furi2810@upi.edu3

**Abstrak**

**https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/2407**

Tujuan penelitian adalah menganalisis aspek-aspek pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dasar, salah satunya adalah perubahan kurikulum yang menjadi salah satu upaya perbaikan proses pembelajaran. Penelitian dengan metode literatur ini menemukan bahwa pada kurikulum 2013 di Sekolah Dasar, Pendidikan Kewarganegaraan mencakup tujuan, strategi, materi serta evaluasi pembelajaran. Untuk mencapai hasil pembelajaran maksimal guru perlu memperdalam pemahaman urgensi Pendidikan Kewarganegaraan serta dapat mengembangkan kreatifitasnya dalam menciptakan metode pembelajaran.

**Kata kunci:** Pembelajaran PKN, Kurikulum kewargangaraan, Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Dasar

**Abstract**

The purpose of the research is to analyze aspects of civic education learning in elementary schools, one of which is curriculum changes which is one of the efforts to improve the learning process. Research with this method of literature found that in the 2013 curriculum at Elementary School, Civic Education includes objectives, strategies, materials as well as learning evaluations. To achieve maximum learning outcomes, teachers need to deepen their understanding of the urgency of Civic Education and be able to develop their creativity in creating learning methods.

**Keywords:**Civic Education learning, Citizenship Curriculum, Elementary School

**PENDAHULUAN**

Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) di sekolah dasar memiliki arti penting bagi siswa pada pembentukan pribadi warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Depdiknas, 2006:97-104). Untuk membentuk warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) memiliki peran yang strategis dan penting, yaitu dalam membentuk siswa maupun sikap dalam berperilaku sehari-hari, sehingga diharapkan mampu menjadi pribadi yang lebih baik. Minat belajar siswa pada bidang PKN ini perlu mendapat perhatian khusus karena minat merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan proses belajar. Di samping itu minat yang timbul dari kebutuhan siswa merupakan faktor penting bagi siswa dalam melaksanakan kegiatankegiatan-kegiatan atau usaha-usahanya (Susanto, 2013). Pendidikan Kewarganegaraan adalah Pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru, tentang kesadaran bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak masyarakat (Saidurrahman, 2018).

Telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (cf Fadjar, 2003; dan Iorio & Yeager, 2011). Menurut J. Branson (1999), tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah partisipasi yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat di tingkat lokal, negara bagian, dan nasional (Branson, 1999:7). Tujuan pembelajaran PKn menurut Depdiknas tahun 2006 adalah untuk memberikan kompetensi, sebagai berikut

1. berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu-isu kewarganegaraan;
2. Berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
3. Bertumbuh secara positif dan demokratis untuk membentuk karakter masyarakat Indonesia yang berbasis pembentukan diri untuk hidup bersama dengan bangsa lain; dan
4. Berinteraksi dengan bangsa lain dalam aturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. (cf Winataputra & Budimansyah, 2007; Tovmasyan & Thoma, 2008; dan Nurdin, 2015).

Menurut Sapriya (2011), tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah partisipasi penuh rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan politik warga negara yang taat pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia (Sapriya, 2011). Partisipasi warga negara yang efektif dan bertanggung jawab membutuhkan penguasaan seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan intelektual dan keterampilan untuk berpartisipasi. Partisipasi yang efektif dan bertanggung jawab tersebut dapat lebih ditingkatkan melalui pengembangan watak atau sifat tertentu yang meningkatkan kemampuan individu untuk berpartisipasi dalam proses politik dan mendukung berfungsinya sistem politik yang sehat dan perbaikan masyarakat (Sapriya, 2011; dan Nurdin), 2015). Tujuan umum pembelajaran PKn adalah mendidik warga negara menjadi warga negara yang baik, digambarkan sebagai warga negara yang patriotik, toleran, setia berbangsa dan bernegara, religius, demokratis, dan jujur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan negara mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik, yaitu warga negara yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual, memiliki rasa bangga dan tanggung jawab, serta mampu berperan serta dalam kehidupan masyarakat.

**METODE PENELITIAN**

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif dengan study literatur. Dimana, Peneliti mengambil beberapa sumber informasi dari banyak penelitian sebelumnya. Hal itu digunakan sebagai perbandingan, baik itu kekurangan atau kelebihan yang sudah ada pada penelitian sebelumnya. Penelitian ini menelaah mengenai Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar dengan Metode Literatur.

**PEMBAHASAN**

Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban warga negara agar segala sesuatu yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa serta tidak menyimpang dari yang diharapkan. Dianggap penting, pendidikan ini telah dilaksanakan sejak usia dini di semua jenjang pendidikan, dari pendidikan awal hingga perguruan tinggi, sehingga dapat menghasilkan penerus-penerus yang kompeten dan siap menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekolah dasar merupakan langkah awal dalam memperoleh pengetahuan bagi siswa. Salah satu topik yang akan dipelajari oleh siswa sekolah dasar adalah pendidikan kewarganegaraan. Pembelajaran sosial di sekolah dasar memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan peserta didik yang kreatif berpikir kritis, reaktif dan inovatif. Hakikat pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar adalah program pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila untuk mengembangkan dan memelihara nilai-nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa, yang seharusnya menjadi identitas yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran membentuk diri yang beragam dalam hal agama, masyarakat, budaya, bahasa, usia, dan suku yang bertujuan membentuk warga negara yang memahami dan dapat menjalankan hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, cakap, dan cerdas menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, cakap, dan cerdas serta berkarakter sebagaimana diamanatkan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Kualitas pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kurikulum, guru atau tenaga pengajar, fasilitas dan bahan ajar. Setiap pelajaran yang disampaikan pada tingkat pendidikan ini mengarah pada pembentukan landasan akademik yang kokoh bagi siswa. Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) merupakan salah satu proses pembelajaran yang diajarkan pada tingkat sekolah dasar. (PKN) dalam arti yang lebih luas bukanlah kurikulum yang hanya meningkatkan kewarganegaraan, tetapi membawa nilai-nilai/karakter dan keterampilan lain agar siswa dapat berfungsi secara efektif. Pembelajaran sosial sangat penting untuk diajarkan kepada siswa di jenjang pendidikan dasar. Permasalahan yang muncul pada siswa saat kegiatan pembelajaran, yakni kurang disiplin, tidak bisa menghargai pendapat teman dan kurang mandiri. Hal ini membuat kegiatan pembelajaran kurang efektif, sehingga penguasaan keterampilan oleh siswa tidak maksimal. Kondisi ini juga terjadi pada hasil belajar siswa terhadap pembelajaran kewarganegaraan. Sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran pada siswa, guru perlu membuat variasi penggunaan model pembelajaran. Dengan variasi pembelajaran, siswa akan antusias dan tidak bosan dalam belajar, secara tidak langsung indikator dalam setiap kandungan pembelajaran dapat dipahami oleh siswa dengan mudah dan menyenangkan. Dalam suatu proses pembelajaran, siswa harus terlibat aktif dalam mengamati, menanya, mengumpulkan berbagai informasi dalam kegiatan pembelajaran, menalar dan mengkomunikasikan hasil belajar.

Perubahan kurikulum pendidikan dasar dari program 2006 (KTSP) menjadi program 2013. Salah satunya adalah program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ada 4 aspek yang menjadi sentral analisis perubahan kurikulum pendidikan kewarganegaraan antara KTSP dan kurikulum 2013, yaitu: tujuan pembelajaran, isi atau materi pembelajaran, strategi atau metode, dan penilaian pembelajaran. Pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran PKN dalam kurikulum pada jenjang satuan pendidikan telah dikembangkan dengan mengacu pada standar kompetensi sertifikat (SKL) satuan pendidikan, standar kompetensi kelompok mata pelajaran, serta standar kompetensi dan kompetensi inti dari kompetensi yang ditetapkan. oleh pemerintah (Mulyasa, 2006: 91). SKL Satuan Pendidikan telah ditetapkan per jenjang oleh Pemerintah dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 23 Tahun 2006. Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SKKMP) menunjukkan kualifikasi minimal siswa yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang harus diperoleh pada setiap jenjang pendidikan untuk kelompok mata pelajaran tertentu. (SKKMP) Jurusan Kewarganegaraan dan Kepribadian disusun berdasarkan tujuan yaitu: “Membentuk siswa menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”. Tujuan pembelajaran dalam kurikulum mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan 2013 untuk sekolah dasar telah dikembangkan dari SKL per jenjang pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 20 Tahun 2016 (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 2016). Tujuan pembelajaran benchmark program 2013 dikembangkan dari SKL, standar substantif, kompetensi inti dan kompetensi inti. Standar isi PKN dalam Permendikbud No. 21 Tahun 2016 (Mendikbud, 2016) menyebutkan bahwa kompetensi untuk pendidikan dasar, yakni

1. Menunjukkan sikap sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa dalam rangka kebhinekaan kehidupan dilingkungan rumah dan sekolah sebagai perwujudan moral Pancasila.
2. Mengenal ciri-ciri individu, peraturan, kesatuan, dan simbol-simbol Pancasila.
3. Menerapkan disiplin dalam rangka pergaulan yang beragam di lingkungan rumah, dan sekolah sesuai dengan sila-sila Pancasila.
4. Menerima karunia Tuhan Yang Maha Esa atas sifat dan karakter individu, hak dan kewajiban, serta persatuan dalam keberagaman.
5. Memahami makna simbol-simbol Pancasila di rumah keberagaman sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan dan peraturan, bertanggung jawab dan rela berkorban, semangat persatuan dan keragaman.
6. Menunjukkan sikap bangga sebagai bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Melaporkan secara lisan dan tertulis serta memenuhi kewajiban sesuai dengan nilai dan moral Pancasila, menjunjung tinggi tata tertib dan menjaga ketertiban, kerjasama, nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta keberagaman di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Sejak bergulirnya kurikulum berbasis kompetensi dinas Pendidikan Indonesia untuk menggunakan pendekatan tematik saintifik berbasis 5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan dan berkomunikasi. Alasan pemerintah menerapkan pembelajaran PKN untuk menerapkan pembelajaran tematik, antara lain, keadaan pikiran anak yang masih holistik artinya siswa berusia sekitar empat sampai sepuluh tahun, pola pikirnya masih menyatu, biasanya menjadi pemikiran yang terfragmentasi karena pola asuh orang dewasa memisahkan mereka. Peserta didik SD masih kongkrit rasional menurut Jean Piaget bahwa pada usia ini mereka masih membutuhkan alat peraga (media) yang konkrit (nyata) untuk menjelaskan suatu konsep. Dalam proses belajar mengenal suatu konsep tentunya tidak lepas dari kehidupan yang paling dekat dengan lingkungan peserta didik dengan cara selain itu, proses pembelajaran menitikberatkan pada pengembangan tiga ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik secara utuh dan secara holistik, pengembangan suatu ranah yang tidak dapat dipisahkan dari ranah lainnya. Untuk mencapai ketiga bidang tersebut, guru harus menguasai berbagai model atau metode pengajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa.

Kegiatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar berorientasi pada pembentukan kompetensi peserta didik sesuai dengan perkembangan psikologis, intelektual, emosional, dan sosial. Pendidikan kewarganegaraan berorientasi pada “kecerdasan plural kontekstual” Sebuah konsep yang berpikiran terbuka terhadap kebutuhan belajar yang lebih kreatif, partisipatif, dan bermakna serta menyenangkan. Oleh karena itu, untuk memperlancar kegiatan pembelajaran PKN di sekolah dasar perlu didukung dengan media pembelajaran yang tepat. Media pembelajaran harus menarik, sehingga dapat membuat siswa berinteraksi dan belajar dengan cara yang menyenangkan sehingga terbentuk suasana belajar yang nyaman dan kondusif untuk itu perlu. Oleh karena itu, diperlukan media pembelajaran yang interaktif. Media pembelajaran interaktif didesain dengan menarik dan menyenangkan, pola penyajian membuat siswa lebih mudah memahami materi pembelajaran.

**SIMPULAN**

Sistem Pendidikan Indonesia telah mengalami banyak perubahan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, salah satunya penerapan kurikulum 2013. Sebagai bagian dari reformasi upaya konstruktif dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidik dan peserta didik dalam pemahaman kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan. Konsep mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum 2013 menjadi salah satu mata pelajaran di Sekolah Dasar yang terintegrasi dengan mata pelajaran Pendidikan Bahasa Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan dipelajari sejak pendidikan sekolah dasar dengan harapan dapat menghasilkan penerus-penerus yang kompeten dan siap menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi pembelajaran interaktif yang dikembangkan terbukti valid dan praktis serta berpotensi mempengaruhi hasil belajar siswa pada mata pelajaran kewarganegaraan di sekolah dasar. Penggunaan bahan ajar interaktif yang dikembangkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga dapat meningkatkan prestasi siswa.

**DAFTAR PUSTAKA**

Komara, E. (2017). *Curriculum and Civic Education Teaching in Indonesia* (Vol. (10)1). International Journal for Education Studies.

magdalena, i. (2020). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Sekolah Dasar Negeri Bojong 3 Pinang* (Vol. 2). Jurnal Pendidikan dan Sains.

Rachmadtullah, R. (2018). *Development Of Interactive Learning Media on Civic Education Subjects in Elementary School* (Vol. 251). Atlantis Press.

Senmay, K. (2021). *Keefektifan Model Quantum Teaching di SD Pembelajaran PKN Siswa Sekolah* (Vol. 540). Atlantis Press.

Prastowo, A. (2018). P*erubahan Kurikulum Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan SD/MI Di Indonesia: Dari KTSP Menuju Kurikulum 2013* (Volume VIII). Jurnal Tarbiyah Al-Awlad.

Kurniawan, M. I. (2013). *Integrasi Pendidikan Karakter Ke dalam Pembelajaran Kewarganegaraan Di Sekolah Dasar.* Jurnal Pemikiran dan Pengembangan SD. 37-45.